

Satpol PP Dan Penanganan Bencana: Studi Kasus Kolaborasi Penegakan Ketertiban Dan Kesiapsiagaan Di Kabupaten Sumedang

Ghany Kusuma Wardhani¹⁾, Sapto Pramono²⁾, Zainal Fatah³⁾, Ika Devy Pramudiana⁴⁾

^{1),2),3),4)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: ghanykhususuma@gmail.com

Published: July , 2025

ABSTRACT

Disaster management in areas prone to landslides requires planned and structured cooperation between various parties, including involving Satpol PP as an enforcement agency. This study aims to analyze the strategic function of Satpol PP in supporting disaster preparedness and management in Sumedang Regency, especially through collaboration with BPBD, TNI/Polri, village officials, and volunteers. The approach used is qualitative with a case study design, data collection through in-depth interviews, observation of evacuation simulation activities, and analysis of policy documents and disaster management reports during the period January–April 2025. The research findings indicate that the presence of Satpol PP not only contributes to the control of landslide-prone areas and securing evacuation routes, but also increases public compliance with development regulations in dangerous zones, as seen from the reduced number of violations. Collaboration between sectors has been shown to speed up the evacuation process during simulations and reduce the potential risk of loss of life. However, this study also identified challenges such as a lack of trained experts, suboptimal division of roles, and spatial data on vulnerable areas that have not been well integrated. The study's conclusion emphasizes the need to strengthen a more structured collaboration model, expand disaster training for Satpol PP personnel, and update disaster management regulations to be more responsive and flexible. It is recommended that local governments form inter-sectoral forums that actively involve Satpol PP in planning, implementing, and evaluating disaster risk reduction policies in landslide-prone areas.

Keywords: *Satpol PP, Disaster Management, Government Collaboration*

ABSTRAK

Penanganan bencana pada wilayah yang rentan terhadap longsor memerlukan kerjasama antar berbagai pihak yang terencana dan terstruktur, termasuk melibatkan Satpol PP sebagai instansi penegak ketertiban. Studi ini bertujuan untuk menganalisis fungsi strategis Satpol PP dalam mendukung kesiapan dan penanganan bencana di Kabupaten Sumedang, terutama melalui kerja sama dengan BPBD, TNI/Polri, perangkat desa, serta relawan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan simulasi evakuasi, serta analisis dokumen kebijakan dan laporan penanganan bencana selama periode Januari–April 2025. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keberadaan Satpol PP tidak hanya berkontribusi pada penertiban area berisiko longsor dan pengamanan rute evakuasi, tetapi juga mempertinggi kepatuhan warga terhadap regulasi pembangunan di zona berbahaya, yang terlihat dari berkurangnya jumlah pelanggaran. Kolaborasi antar sektor terbukti mempercepat proses evakuasi selama simulasi dan mengurangi kemungkinan risiko korban jiwa. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan seperti kurangnya tenaga ahli yang terlatih, pembagian peran yang belum maksimal, dan data spasial mengenai daerah rawan yang belum terintegrasi dengan baik. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya memperkuat model kolaborasi yang lebih terstruktur, memperluas pelatihan kebencanaan untuk personel Satpol PP, serta memperbarui regulasi penanganan bencana agar lebih responsif dan fleksibel. Disarankan agar pemerintah daerah membentuk forum antar sektor yang secara aktif melibatkan Satpol PP dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana di daerah rawan longsor.

Kata Kunci: *Satpol PP, Penanganan Bencana, Kolaborasi Pemerintah*

LATAR BELAKANG

Penanggulangan bencana di Indonesia bukan hanya tanggung jawab lembaga kebencanaan seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan juga memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak pemerintah dan masyarakat. Indonesia, yang merupakan negara rentan bencana, mencatat 2.017 insiden bencana pada tahun 2024, mayoritasnya berupa banjir, longsor, dan angin kencang (Janati & Ramadhan, 2025). Studi-studi terbaru menekankan signifikansi penguatan kolaborasi multilevel dan multisektor dalam tata kelola kebencanaan yang berbasis pada resiliensi (Fitriyanti, 2023; Puspita et al., 2024). Akan tetapi, diskursus akademis selama ini lebih banyak terpusat pada kolaborasi antara lembaga terkait bencana dan organisasi masyarakat sipil, sementara peran lembaga penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) umumnya kurang dibahas sebagai komponen penting dalam sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab utama menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum, Satpol PP sebenarnya memiliki potensi strategis dalam mendukung kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Suhendi (2019) menyebutkan bahwa Satpol PP dapat mengambil peran penting, mulai dari pengamanan rute evakuasi hingga penegakan regulasi area berisiko bencana. Akan tetapi, pelaksanaan peran itu seringkali menemui hambatan seperti kurangnya tenaga kerja terlatih, rendahnya prosedur operasional standar terkait bencana, serta lemahnya integrasi peran Satpol PP dalam rencana kontinjensi daerah (Rudi et al., 2019). Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana potensi ini dapat dimaksimalkan melalui kerjasama yang efisien, khususnya di area dengan kerentanan geologis yang tinggi seperti Kabupaten Sumedang.

Kabupaten Sumedang yang terletak di Jawa Barat adalah salah satu wilayah dengan risiko bencana yang cukup tinggi, terutama terhadap tanah longsor dan banjir bandang (Abdullah, 2023; Rizal, 2020). Tindakan penanggulangan bencana di wilayah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk BPBD, TNI, Polri, PMI, dan relawan setempat. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada fungsi teknis BPBD, sedangkan masih sedikit yang mengeksplorasi model kerjasama penegakan hukum oleh Satpol PP dalam konteks kesiapsiagaan dan mitigasi di wilayah rawan longsor seperti Sumedang (Nuraeni, 2025).

Dari kajian pustaka yang telah dijelaskan, terdapat kekosongan penelitian yang signifikan, yaitu minimnya pemahaman mengenai bagaimana kolaborasi antar lembaga, terutama peran Satpol PP sebagai pelaksana penegakan ketertiban, dapat mendukung kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Kesenjangan ini sangat penting untuk diatasi mengingat bahwa penanganan bencana tidak hanya terfokus pada respons setelah bencana, melainkan juga pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang memerlukan partisipasi dari pihak-pihak yang memiliki otoritas menjaga ketertiban umum (Marliyana, 2025). Studi ini berusaha untuk mengisi kekurangan tersebut melalui analisis kasus kerja sama Satpol PP dalam menangani bencana di Kabupaten Sumedang.

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan kekurangan dalam penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Satpol PP dalam mendukung penanggulangan bencana di Kabupaten Sumedang, serta cara kolaborasi dengan BPBD dan pihak-pihak terkait dapat memperkuat kesiapsiagaan serta penegakan ketertiban di kawasan yang rentan longsor. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoretis pada penguatan pengelolaan kebencanaan berbasis kolaborasi serta sumbangan praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih terintegrasi. Oleh karena itu, artikel ini relevan untuk diskursus penguatan institusi kebencanaan di level daerah yang inklusif dan responsif terhadap risiko bencana yang semakin rumit.

LANDASAN TEORI

Penanggulangan bencana di level daerah adalah elemen penting dari pengelolaan layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dan pemenuhan hak atas keamanan. Menurut Denhardt & Denhardt (Fitriana, 2024), paradigma *New Public Service* mendorong pegawai pemerintah untuk lebih responsif, partisipatif, dan kolaboratif dalam melayani publik, termasuk dalam konteks bencana. Dalam konteks ini, bencana bukan hanya tanggung jawab teknis dari lembaga tertentu seperti BPBD, tetapi juga memerlukan koordinasi dengan pihak lain yang memiliki tugas menjaga ketertiban dan keamanan,

seperti Satpol PP. Ide ini sejalan dengan temuan Robbyanto (2018) yang menekankan bahwa efektivitas penanganan bencana sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pemerintah dalam berkolaborasi antar sektor dan mengutamakan layanan publik yang responsif terhadap situasi di lapangan (Negoro et al., 2025).

Selanjutnya, teori *Collaborative Governance* (Nur et al., 2024) menguraikan bahwa kolaborasi antar lembaga, baik secara vertikal maupun horizontal, adalah syarat utama untuk menangani masalah publik yang kompleks seperti bencana. Dalam konteks Indonesia, studi oleh Heru et al. (2024) menekankan bahwa kerentanan bencana membutuhkan model pengelolaan kolaboratif, di mana Satpol PP dapat berperan penting dalam menjaga ketertiban pada saat evakuasi, mengatur lalu lintas darurat, serta memastikan kepatuhan masyarakat terhadap daerah rawan bencana. Kerjasama ini melibatkan alokasi peran yang tegas, pembuatan prosedur bersama, serta komunikasi yang intensif sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana.

Konsep manajemen pelayanan publik dalam penanggulangan bencana sangat berkaitan dengan prinsip *co-production* (Suryo et al., 2025), yang melibatkan partisipasi aktif antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan layanan publik yang lebih efisien. Satpol PP, sebagai lembaga penegak ketertiban, memiliki hubungan langsung dengan masyarakat di tingkat lokal yang memungkinkan mereka berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan warga saat bencana terjadi. Inovasi yang dilakukan daerah lain (Arfandy, 2019; Hengki, 2025; Saputra, 2021) mengindikasikan bahwa keterlibatan pihak non-kebencanaan seperti Satpol PP dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap prosedur evakuasi dan peraturan daerah terkait zona rentan longsor.

Di samping itu, penanganan bencana sebagai bagian dari pengelolaan layanan publik juga memerlukan perencanaan darurat yang menyeluruh dan fleksibel. Menurut Mahardhani et al. (2023), rencana kontinjensi yang efektif seharusnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Satpol PP, agar tidak terjadi kekurangan koordinasi di lapangan. Ketidakhadiran Satpol PP dalam merancang rencana kontinjensi mengakibatkan kendala yang besar dalam penegakan disiplin di daerah rawan longsor dan gangguan ketertiban selama proses evakuasi. Ini mengindikasikan betapa pentingnya memasukkan peran Satpol PP dalam pengelolaan bencana yang lebih terstruktur.

Dari sudut pandang kebijakan publik, kerjasama antar aktor yang melibatkan Satpol PP juga berperan dalam membangun *policy coherence* atau konsistensi kebijakan antara regulasi ketertiban umum dan penanganan bencana (Widayanti et al., 2025). Contohnya, Peraturan Daerah tentang daerah berisiko longsor seharusnya mencakup tidak hanya aspek teknis mitigasi, tetapi juga tata cara penegakan oleh Satpol PP agar pelaksanaannya lebih efisien. Kurangnya partisipasi Satpol PP dalam fase penyusunan kebijakan berdampak pada rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan relokasi dari zona merah.

Oleh karena itu, dasar teori penelitian ini dibentuk dari gabungan teori manajemen pelayanan publik, *collaborative governance*, dan *co-production* yang menyoroti pentingnya kerja sama antaraktor untuk menciptakan penanganan bencana yang lebih responsif, inklusif, serta berkelanjutan. Satpol PP, yang merupakan bagian dari sistem pelayanan publik daerah, memiliki potensi strategis tidak hanya sebagai penegak ketertiban tetapi juga sebagai penggagas kolaborasi dan penjaga kelangsungan kebijakan mitigasi bencana. Kerangka teoritis ini berfungsi sebagai landasan untuk menganalisis lebih mendalam bagaimana kolaborasi antar sektor di Kabupaten Sumedang dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan ketertiban saat terjadi bencana.

METODE

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk meneliti secara mendalam fungsi Satpol PP dalam kerjasama penanganan bencana di Kabupaten Sumedang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Satpol PP, BPBD, perangkat kecamatan, serta tokoh masyarakat setempat, dan melalui observasi langsung terhadap kegiatan simulasi bencana dan penertiban area rawan longsor yang dilakukan antara Januari hingga April 2025. Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap peraturan daerah, rencana kontinjensi bencana, serta laporan tahunan dari Satpol PP dan BPBD. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola

kolaborasi antar aktor, tantangan pelaksanaan, serta kontribusi Satpol PP dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketertiban saat bencana. Keabsahan data dipastikan melalui metode triangulasi sumber dan teknik, diskusi dengan pakar kebencanaan, serta verifikasi hasil sementara kepada informan utama untuk menegaskan akurasi dan kelengkapan temuan (Pahleviannur et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PERAN STRATEGIS SATPOL PP DALAM KESIAPSIAGAAN BENCANA

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Satpol PP Kabupaten Sumedang memiliki peran krusial dalam mendukung persiapan bencana, walaupun belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen rencana kontinjensi daerah. Menurut dokumen Rencana Kontinjensi Tanah Longsor Kabupaten Sumedang Tahun 2023, Satpol PP berperan sebagai salah satu elemen pendukung dalam penegakan tertib di area rawan longsor, namun pelaksanaannya di lapangan sering kali masih bersifat situasional. Data hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penegakan Perda menunjukkan bahwa personel Satpol PP juga diperbantukan di area rawan longsor, dan telah menjalani pelatihan kebencanaan resmi sejak tahun 2022.

Penemuan ini menegaskan penelitian Fedryansyah et al. (2018) yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas teknis merupakan hambatan signifikan bagi lembaga non-kebencanaan dalam mengoptimalkan peran mereka dalam mitigasi. Walaupun begitu, kehadiran Satpol PP di area berisiko bencana sebelum datangnya musim hujan, khususnya di Kecamatan Jatinangor, diakui oleh BPBD setempat telah berkontribusi pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap larangan pembangunan permanen di daerah berbahaya. Data BPBD Sumedang mencatat adanya penurunan pelanggaran dari 36 kasus di 2022 menjadi 19 kasus di 2023.

Analisis yang lebih mendalam mengindikasikan bahwa keberadaan Satpol PP sebagai penegak ketertiban memberikan dampak ganda: tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko, tetapi juga mendukung kelancaran sosialisasi mitigasi yang dilakukan oleh BPBD. Ini sesuai dengan teori co-production yang menekankan perlunya partisipasi berbagai aktor dalam menciptakan layanan publik yang efisien (Alfita et al., 2024). Pemberlakuan larangan konstruksi di area berisiko dianggap penting oleh pemimpin komunitas, karena dapat mengurangi kemungkinan jatuhnya korban jiwa saat longsor terjadi.

Para responden dari perangkat desa menyatakan bahwa masih ada tantangan dalam koordinasi administratif antara Satpol PP dan BPBD, khususnya berkenaan dengan pertukaran data mengenai kawasan rawan baru yang timbul akibat perubahan geologi. Keterbatasan data spasial yang terbaru menyebabkan penertiban sering kali bergantung pada laporan masyarakat dan patroli secara berkala. Kesenjangan informasi ini juga terlihat dalam hasil pengamatan lapangan, di mana sejumlah rambu larangan pembangunan di Dusun Cipareuheun, Kecamatan Sumedang Selatan, nampak rusak dan belum diperbaiki sejak 2021.

2. KOLABORASI LINTAS AKTOR DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA

Penanganan darurat bencana tanah longsor di Sumedang menunjukkan pola kerjasama yang melibatkan Satpol PP, BPBD, TNI, Polri, PMI, serta relawan desa. Data simulasi evakuasi dari longsor yang diadakan oleh BPBD pada Februari 2025 menunjukkan bahwa Satpol PP dilibatkan sebagai koordinator dalam penertiban jalur evakuasi serta pengamanan titik kumpul. Sebanyak 30 anggota Satpol PP dikerahkan untuk menjaga jalur sepanjang 2,5 km di Desa Cigendel, Kecamatan Cimanggung, daerah yang rentan terhadap longsor karena kondisi lereng yang curam.

Wawancara dengan perwakilan BPBD menyatakan bahwa peran Satpol PP sangat berkontribusi dalam mengurangi kecemasan warga dan menjamin kelancaran kendaraan darurat. Hasil ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menekankan pentingnya penegakan ketertiban untuk mempercepat tanggapan darurat dan mengurangi risiko terjadinya korban jiwa. Data BPBD mencatat bahwa rata-rata durasi evakuasi simulasi longsor pada 2025 berkurang menjadi 35 menit, sedangkan pada latihan tahun 2023 adalah 49 menit.

Selain faktor teknis, kerjasama ini juga menunjukkan dinamika kepemimpinan antar sektor. Satpol PP diikutsertakan dalam pertemuan posko darurat dan diminta untuk melaporkan langsung

kepada Ketua Satgas Penanganan Bencana Kabupaten. Model ini sesuai dengan kerangka tata kelola kolaboratif (Mahardhani, 2023) yang menyoroti pentingnya kepemimpinan bersama (shared leadership) serta saluran komunikasi formal. Namun, beberapa responden mengakui bahwa masih ada tumpang tindih tugas antara Satpol PP dan pihak kepolisian, terutama saat penutupan jalan di sekitar area longsor.

Dalam FGD yang berlangsung pada Maret 2025, relawan desa mengusulkan agar Satpol PP lebih rutin berinteraksi dengan masyarakat, tidak hanya saat terjadi bencana. Usulan ini menunjukkan kebutuhan untuk membangun kepercayaan sosial sebagai aset penting dalam kolaborasi. Penelitian terkini oleh Agustina et al. (2024) juga menekankan peran komunikasi persuasif oleh agen penegak hukum untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pada kebijakan terkait bencana.

3. TANTANGAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN KETERTIBAN DI ZONA RAWAN

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah konsistensi dalam penegakan larangan pembangunan di area rawan longsor. Menurut data Satpol PP Sumedang terdapat 42 kasus pembangunan baru di wilayah rawan longsor sepanjang tahun 2023, mayoritas berada di Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Pamulihan. Dari total tersebut, hanya 15 kasus yang berhasil dihentikan atau diungkap secara sukarela oleh pemilik tanah.

Wawancara mendalam menunjukkan, rendahnya tingkat keberhasilan penertiban dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Banyak penduduk masih membangun di daerah berisiko akibat terbatasnya lahan alternatif atau alasan kedekatan dengan sumber penghasilan. Kondisi ini diperberat oleh kurangnya personel: Satpol PP hanya memiliki 112 personel aktif untuk mengawasi 26 kecamatan, sementara prioritas patroli harian masih terfokus pada penegakan perda lainnya seperti PKL dan ketertiban di pasar.

Analisis ini mendukung yang disampaikan oleh Ibnu (2025) yang menyatakan bahwa penegakan kebijakan mitigasi bencana sering kali tidak diutamakan dibandingkan dengan masalah ketertiban ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, proses penertiban bangunan ilegal di daerah yang rawan longsor memerlukan koordinasi administrasi yang cukup lama antara Satpol PP, dinas perizinan, dan pemerintah desa. Prosedur birokrasi yang tak efisien mengakibatkan banyak kasus terhenti dan melemahkan otoritas kebijakan.

Dalam situasi ini, kerja sama antar sektor menjadi krusial untuk meningkatkan legitimasi dan efisiensi penertiban. Usulan BPBD untuk melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi serta proses mediasi dianggap sebagai strategi yang menjanjikan. Metode ini sejalan dengan penelitian terkini oleh Danil (2021) yang menekankan signifikansi pendekatan kultural dan dialogis dalam menguatkan pelaksanaan kebijakan kebencanaan.

4. PENGUATAN MODEL KOLABORASI MENUJU KEBIJAKAN KEBENCANAAN BERKELANJUTAN

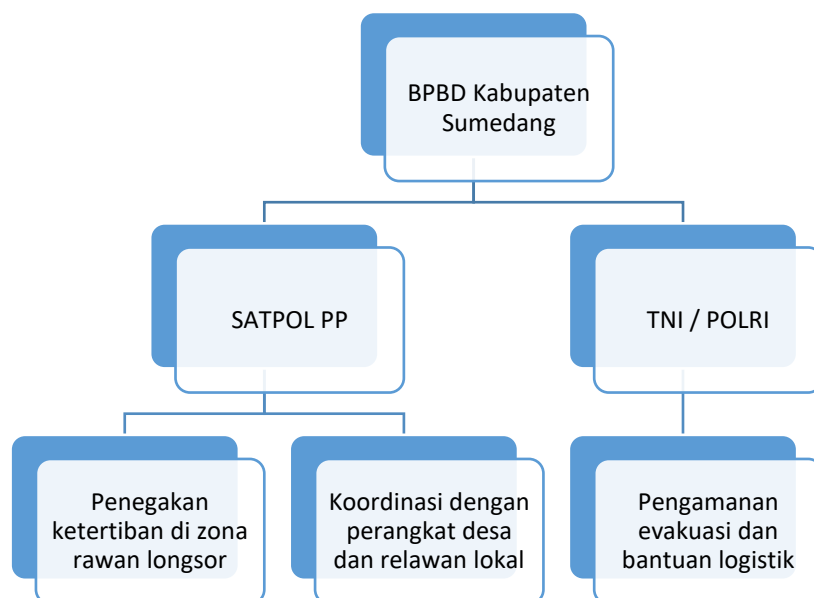
Berdasarkan hasil studi, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun model kolaborasi antar sektor yang lebih terstruktur. Data FGD menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (18 dari 22 orang) mengusulkan pembentukan forum rutin antar sektor yang melibatkan Satpol PP, BPBD, TNI, Polri, perangkat desa, dan relawan untuk membahas pembaruan data daerah rawan serta merancang rencana aksi bersama. Model ini dianggap efektif dalam mengurangi konflik wewenang dan mempercepat respons saat bencana terjadi.

Di samping itu, pelatihan penanganan bencana untuk anggota Satpol PP juga merupakan rekomendasi yang krusial. Menurut informasi dari Satpol PP Sumedang hanya 38% anggota yang telah berpartisipasi dalam pelatihan kebencanaan dalam tiga tahun terakhir. Putri et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kemampuan individu yang mengerti konteks kebencanaan dan dapat bekerja dalam berbagai disiplin.

Penemuan lainnya adalah urgensi mengintegrasikan kebijakan penegakan ketertiban dengan kebijakan penanganan bencana lokal. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Ketertiban Umum harus diperbarui agar secara jelas mencantumkan larangan dan sanksi yang berkaitan dengan pembangunan di daerah rawan bencana. Pendekatan kebijakan yang konsisten

ini, seperti dijelaskan oleh Ramadhan et al. (2024), mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat serta efektivitas penegakan di lapangan.

Oleh karena itu, studi ini menekankan bahwa Satpol PP bukan sekadar pendukung, melainkan memiliki posisi strategis sebagai pengg katalis kolaborasi, penguat ketertiban, dan pelindung keberlanjutan kebijakan mitigasi bencana. Perubahan peran ini memerlukan peningkatan kelembagaan, penguatan kapasitas, serta regulasi yang lebih fleksibel terhadap risiko bencana yang selalu berubah di Kabupaten Sumedang.



Bagan kerjasama di atas menunjukkan model kolaborasi multi-aktor yang menjadikan BPBD sebagai koordinator strategis, sedangkan Satpol PP melaksanakan fungsi penegakan ketertiban serta pengawasan langsung di area rawan bencana. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi ini dilakukan melalui pembentukan posko terpadu, pertemuan koordinasi antar sektor, serta kegiatan simulasi evakuasi yang melibatkan TNI, Polri, relawan desa, dan perangkat desa. Pendekatan ini sejalan dengan konsep tata kelola kolaboratif (Ansell & Gash, 2008) yang menekankan pentingnya kepemimpinan kolektif, komunikasi yang intens, dan pembagian peran yang jelas antara institusi untuk mencapai efektivitas dalam penanganan bencana.

Model ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran Satpol PP sebagai jembatan antara kebijakan kebencanaan dan manajemen pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan wewenang dalam penegakan perda dan hubungan erat dengan masyarakat, Satpol PP berpotensi memperkuat kepatuhan terhadap aturan zona berisiko bencana serta mendukung kelancaran proses evakuasi. Hal ini mendukung hasil terkini yang diungkapkan oleh (Mahardhani et al., 2023, 2025), yang menyebutkan bahwa efektivitas penanganan bencana tidak hanya tergantung pada respons yang cepat, tetapi juga pada kolaborasi tata kelola yang dapat menghubungkan kepentingan kebijakan dan masyarakat di lapangan.

KESIMPULAN

Menindaklanjuti hasil penelitian mengenai kolaborasi Satpol PP dalam penanganan bencana di Kabupaten Sumedang, disimpulkan bahwa Satpol PP memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak kerjasama antara berbagai pihak yang dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta mitigasi bencana, khususnya di daerah yang rentan longsor. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menangani bencana di daerah tidak hanya bergantung pada kesiapan lembaga kebencanaan seperti BPBD, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aktor lain, seperti Satpol PP, TNI/Polri, perangkat desa, dan relawan dapat berkolaborasi melalui mekanisme koordinasi yang sistematis, pembagian tugas yang jelas, dan komunikasi yang intensif secara berkelanjutan. Partisipasi aktif Satpol PP terbukti berkontribusi dalam mengurangi angka pelanggaran

pembangunan di kawasan berisiko dan mempercepat proses evakuasi selama simulasi bencana, meskipun tantangan seperti kurangnya personel terlatih, data spasial yang tidak diperbarui, dan tumpang tindih wewenang masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kebijakan mitigasi bencana yang berbasis pada kesejajaran kebijakan, peningkatan kemampuan personel Satpol PP melalui program pelatihan bencana, serta pembentukan forum kolaborasi antar sektor yang lebih sistematis agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai prinsip tata kelola pelayanan publik yang responsif terhadap risiko bencana yang berubah-ubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2023, December 4). *Sumedang Wilayah Rawan Bencana Alam, Atang Sutarno Minta Warga Waspada dan Siaga*. <https://kapol.id/sumedang-wilayah-rawan-bencana-alam-atang-sutarno-minta-warga-waspada-dan-siaga/>
- Agustina, W., Widana, I. K., & Marnani, C. S. (2024). Tantangan dan Peluang Komunikasi Persuasif dalam Membangun Kepercayaan Publik dan Mendukung Proses Rekonstruksi Pasca Bencana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 410–417. <https://doi.org/10.31316/JK.V8I1.6212>
- Alfita, A., Mubaraq, B. S., & Fajarwati, N. K. (2024). Inovasi Pelayanan Publik Menggunakan Co Creation: Studi Kasus Kota Bandung. *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1(2), 92–102. <https://doi.org/10.62383/FILOSOFI.V1I2.75>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/JOPART/MUM032>
- Arfandy, Y. (2019, November 26). *Satpol PP Gelar Pelatihan Penanggulangan Bencana*. <https://www.bangka.go.id/?q=content/satpol-pp-gelar-pelatihan-penanggulangan-bencana>
- Danil, M. (2021). Manajemen Bencana. *Prosiding Seminar Nasional Dan Internasional Universitas Dharmawangsa*, 7–14. <https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PROSUNDHAR/article/view/2>
- Fedryansyah, M., Pancasilawan, R., & Ishartono, I. (2018). Penanggulangan Bencana di Masyarakat Desa Studi di Desa Cipacing, Desa Cileles, dan Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Share : Social Work Journal*, 8(1), 11–16. <https://doi.org/10.24198/SHARE.V8I1.15961>
- Fitriana, A. R. D. (2024). Analisis Inovasi Roti 7 Lapis (Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Kebakaran Gratis) di Kota Surabaya dalam Perspektif New Public Service. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 7(3), 275–287. <https://doi.org/10.37504/MAP.V7I3.651>
- Fitriyanti, E. (2023). Analisis Kolaborasi Organisasi dalam Penanganan Tanggap Bencana di Kabupaten Bandung. *Journal of Government Studies*. <https://jurnal.unugo.ac.id/jgs/index.php/jgs/article/view/1>
- Hengki. (2025, March 17). *Satpol PP Kalteng Laksanakan Patroli Banjir, Imbau Masyarakat Tetap Waspada*. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/46447/satpol-pp-kalteng-laksanakan-patroli-banjir-imbau-masyarakat-tetap-waspada>
- Heru, Roekminiati, S., & Pramono, S. (2024). Strategi Optimalisasi Penanganan Bencana Banjir oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(3), 553–566. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/9494>
- Ibnu, E. (2025, July 7). *Mitigasi Bencana: Strategi, Tantangan, dan Implementasi di Indonesia*. <https://smartid.co.id/mitigasi-bencana-strategi-tantangan-dan-implementasi-di-indonesia/>
- Janati, F., & Ramadhan, A. (2025, January 8). *BNPB Catat Ada 2.107 Bencana di Indonesia pada 2024, Turun Dibandingkan 2023*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/08/08121321/bnpb-catat-ada-2107-bencana-di-indonesia-pada-2024-turun-dibandingkan-2023>
- Mahardhani, A. J. (2023). *Pemerintahan Kolaboratif (Menjawab Tantangan Masa Depan)*. Literasi Nusantara. <https://penerbitlitnus.co.id/portfolio/pemerintahan-kolaboratif-menjawab-tantangan-masa-depan/>
- Mahardhani, A. J., Darmawan, D. A., Sunarto, S., & Mufanti, R. (2025). Zero Stunting Villages: Analyzing the Challenges and Imperatives of Actor Collaboration. *Jurnal Public Policy*, 11(2), 133–140. <https://doi.org/10.35308/JPP.V11I2.11024>

- Mahardhani, A. J., Sulton, Cahyono, H., & Asmaroini, A. P. (2023). Disaster Management and Citizens Value as the Basic Policy. *Proceedings of the 4th Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science*, 383–388. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_43
- Marliyana, P. (2025, May 23). *Pemkab Sumedang dan BASARNAS Perkuat Kolaborasi Kesiapsiagaan Bencana*. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/pemkab-sumedang-dan-basarnas-perkuat-kolaborasi-kesiapsiagaan-bencana>
- Negoro, A. H. S., Pahmi, S., Enala, S. H., Holivil, E., Nurdialy, M., Djasuli, M., Suyatno, Amane, A. P. O., Mahardhani, A. J., Alaslan, A., & Arintyas, A. P. R. D. A. (2025). *Manajemen Administrasi Publik*. Widina Media Utama .
- Nur, M., Fitriani, A., Usulu, E. M., & Mahardhani, A. J. (2024). *Inovasi dalam Administrasi Publik*. Media Penerbit Indonesia .
- Nuraeni, A. S. (2025). *Strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan bencana alam pada daerah rawan bencana*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. D., Saputra, D. N., Mardianto, D., & Mahardhani, A. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Puspita, S., Junadi, & Wulandari, S. (2024). Collaborative Governance dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bojonegoro. *JLAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)*, 8(1), 16–26. <https://doi.org/10.56071/JIAN.V8I1.829>
- Putri, K. S., Mattunruang, A. A., Idris, M., Yeni, H., Japar, R., Bastri, J., Fajeriani, N., Saiyed, R., Asdar, M., Haeril, Fadlina, Sutriana, Suharto, & Sugianto. (2024). *Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Lajagoe Pustaka. <https://stieindonesia-stikimks.ac.id/storage/2024/11/manajemen-perubahan-organisasi-fix.pdf>
- Ramadhan, S., Fitri, H., Suganda, D. A., & Said, A. L. (2024). *Kebijakan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan*. Media Penerbit Indonesia.
- Rizal, M. (2020, January 29). *Waspada, 23 Kecamatan di Kabupaten Sumedang Rawan Longsor*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4877978/waspada-23-kecamatan-di-kabupaten-sumedang-rawan-longsor>
- Robbyanto, M. Y. (2018). *Sinergi Antara Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, dan Masyarakat Dalam Manajemen Bencana di Kabupaten Jombang*. Universitas Brawijaya.
- Rudi, R., Kadir, M. A. A., Kalibey, I., & Basri, L. (2019). Analisis Kinerja Satpol PP dalam Penegakan PERDA terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.33506/JN.V5I1.703>
- Saputra, Y. (2021, November 2). *Berita 40 Personil Satpol PP Dilatih Pencegahan dan Mitigasi Bencana di Hotel Grand Syariah*. <https://satpolppwh.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/40-personil-satpol-pp-dilatih-pencegahan-dan-mitigasi-bencana-di-hotel-grand-syariah>
- Suhendi, D. (2019). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pelindung Masyarakat. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 117–122. <https://doi.org/10.33701/JPKP.V1I2.716>
- Suryo, N. A. H. (Abul), Pahmi, S. (Syamsul), Enala, S. H. (Syahrabudin), Holivil, E. (Ernestus), Nurdialy, M. (Mela), Djasuli, M. (Mohamad), Suyatno, S. (Suyatno), Ode, A. A. P. (Ade), Mahardhani, A. J. (Ardhana), Alaslan, A. (Amtai), & Rosa, D. A. A. A. P. (Ameylia). (2025). *Manajemen Administrasi Publik*. Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/594370/>
- Widayanti, Kusworini, & Winarni, W. D. (2025). The Role of Local Governments in Spatial and Building Regulations: A Review of State Administrative Law. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(2), 776~780-776~780. <https://doi.org/10.56338/IJHESS.V7I2.7333>